



# **BUPATI SAMBAS**

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 44 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
DI KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati / Walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2017 Nomor 10);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2018

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Alokasi Dasar adalah alokasi dana yang dibagi secara merata yang besarnya sama untuk setiap desa.
7. Alokasi Afirmasi adalah alokasi dana yang diberikan kepada desa dengan kriteria dan persyaratan tertentu dalam upaya mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah di tingkat desa.

8. Alokasi Formula adalah alokasi dana yang diberikan kepada desa dengan memperhatikan kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi di desa.

## BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

### Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula.

### Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

### Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ per Desa} = AA_{Kab/Kota} / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan:

AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa

$AA_{Kab/kota}$  = Alokasi Afirmasi Kab/Kota Dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN TA 2018

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

#### Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten/kota.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten/kota.

AF Kab/Kota = Alokasi Formula kabupaten/kota.

## Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

## Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III PENYALURAN DANA DESA

### Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD Tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima:
  - a. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
  - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, dari Kepala Desa.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I dari Kepala Desa.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).

- (6) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

#### BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

##### Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada prioritas yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

##### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

## Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

## BAB V PELAPORAN DANA DESA

### Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

## BAB VI SANKSI

### Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (3) atau Pasal 9 ayat (4);
  - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen);



dan/atau

- c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa Tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
  - (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada Tahap I, penyaluran Dana Desa Tahap I tidak dilakukan.
  - (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
  - (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
  - (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
  - (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
  - (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

#### Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah

diterima;

b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sambas Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2017 Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 8 Desember 2017

BUPATI SAMBAS,  
TTD  
ATBAH ROMIN SUHALI

Diundangkan di Sambas  
pada tanggal 8 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

URAY TAJUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2017 NOMOR 44

Salinan sesuai aslinya  
Kepala Bagian Hukum



MARJUNI, SH

Pembina Tk. I / (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMBAS  
 NOMOR 44 TAHUN 2017  
 TANGGAL 8 DESEMBER 2017  
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN  
 PENETAPAN RINCIAN DANA  
 DESA SETIAP DESA DI  
 KABUPATEN SAMBAS TAHUN  
 ANGGARAN 2018

ALOKASI PAGU DANA DESA KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2018

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	SAMBAS	DALAM KAUM	616,345,000	-	210,219,000	826,564,000
2	SAMBAS	LUBUK DAGANG	616,345,000	147,071,000	217,746,000	981,162,000
3	SAMBAS	TANJUNG BUGIS	616,345,000	-	109,211,000	725,556,000
4	SAMBAS	PENDAWAN	616,345,000	-	77,327,000	693,672,000
5	SAMBAS	PASAR MELAYU	616,345,000	-	55,716,000	672,061,000
6	SAMBAS	DURIAN	616,345,000	-	34,119,000	650,464,000
7	SAMBAS	LORONG	616,345,000	-	193,878,000	810,223,000
8	SAMBAS	JAGUR	616,345,000	-	54,791,000	671,136,000
9	SAMBAS	TUMUK MANGGIS	616,345,000	-	40,725,000	657,070,000
10	SAMBAS	TANJUNG MEKAR	616,345,000	-	88,231,000	704,576,000
11	SAMBAS	SEBAYAN	616,345,000	-	167,297,000	783,642,000
12	SAMBAS	KARTIASA	616,345,000	-	337,777,000	954,122,000
13	SAMBAS	SAING RAMBI	616,345,000	147,071,000	215,683,000	979,099,000
14	SAMBAS	LUMBANG	616,345,000	-	267,809,000	884,154,000
15	SAMBAS	SUNGAI RAMBAH	616,345,000	-	253,222,000	869,567,000
16	SAMBAS	GAPURA	616,345,000	-	418,952,000	1,035,297,000
17	SAMBAS	SUMBER HARAPAN	616,345,000	147,071,000	181,077,000	944,493,000
18	SAMBAS	SEMANGAU	616,345,000	-	125,517,000	741,862,000
19	TELUK KERAMAT	SUNGAI KUMPAI	616,345,000	-	193,073,000	809,418,000
20	TELUK KERAMAT	SEKURA	616,345,000	-	263,445,000	879,790,000
21	TELUK KERAMAT	TRI MANDAYAN	616,345,000	-	185,708,000	802,053,000
22	TELUK KERAMAT	PEDADA	616,345,000	-	116,118,000	732,463,000
23	TELUK KERAMAT	LELA	616,345,000	-	193,220,000	809,565,000
24	TELUK KERAMAT	PURINGAN	616,345,000	-	150,423,000	766,768,000
25	TELUK KERAMAT	BERLIMANG	616,345,000	-	170,555,000	786,900,000
26	TELUK KERAMAT	SUNGAI BARU	616,345,000	147,071,000	272,692,000	1,036,108,000
27	TELUK KERAMAT	SENGAWANG	616,345,000	147,071,000	258,658,000	1,022,074,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
28	TELUK KERAMAT	TELUK KASEH	616,345,000	-	160,712,000	777,057,000
29	TELUK KERAMAT	SEPADU	616,345,000	-	98,400,000	714,745,000
30	TELUK KERAMAT	TAMBATAN	616,345,000	-	124,741,000	741,086,000
31	TELUK KERAMAT	KUBANGGA	616,345,000	-	151,986,000	768,331,000
32	TELUK KERAMAT	SUNGAI SERABEK	616,345,000	-	158,113,000	774,458,000
33	TELUK KERAMAT	SAYANG SEDAYU	616,345,000	-	120,892,000	737,237,000
34	TELUK KERAMAT	PIPIT TEJA	616,345,000	-	134,341,000	750,686,000
35	TELUK KERAMAT	MATANG SEGANTAR	616,345,000	-	87,590,000	703,935,000
36	TELUK KERAMAT	MULIA	616,345,000	-	138,838,000	755,183,000
37	TELUK KERAMAT	TELUK KUMBANG	616,345,000	-	154,027,000	770,372,000
38	TELUK KERAMAT	SAMUSTIDA	616,345,000	147,071,000	227,677,000	991,093,000
39	TELUK KERAMAT	TANJUNG KERUCUT	616,345,000	-	184,226,000	800,571,000
40	TELUK KERAMAT	SEBAGU	616,345,000	-	116,026,000	732,371,000
41	TELUK KERAMAT	MEKAR SEKUNTUM	616,345,000	-	173,578,000	789,923,000
42	TELUK KERAMAT	KUALA PANGKALAN KERAMAT	616,345,000	-	142,930,000	759,275,000
43	TELUK KERAMAT	SABING	616,345,000	-	99,100,000	715,445,000
44	JAWAI	SARANG BURUNG DANAU	616,345,000	147,071,000	334,607,000	1,098,023,000
45	JAWAI	SUNGAI NILAM	616,345,000	-	184,667,000	801,012,000
46	JAWAI	SARANG BURUNG KOLAM	616,345,000	-	228,507,000	844,852,000
47	JAWAI	SARANG BURUNG USRAT	616,345,000	147,071,000	247,331,000	1,010,747,000
48	JAWAI	SARANG BURUNG KUALA	616,345,000	-	201,558,000	817,903,000
49	JAWAI	PELIMPAAN	616,345,000	-	236,358,000	852,703,000
50	JAWAI	PARIT SETIA	616,345,000	-	202,951,000	819,296,000
51	JAWAI	BAKAU	616,345,000	-	194,305,000	810,650,000
52	JAWAI	SUNGAI NYIRIH	616,345,000	-	163,773,000	780,118,000
53	JAWAI	SENTEBANG	616,345,000	-	315,089,000	931,434,000
54	JAWAI	DUNGUN LAUT	616,345,000	-	218,288,000	834,633,000
55	JAWAI	LAMBAU	616,345,000	-	117,960,000	734,305,000
56	JAWAI	MUTUS DARUSSALAM	616,345,000	-	108,124,000	724,469,000
57	TEBAS	TEBAS KUALA	616,345,000	-	225,078,000	841,423,000
58	TEBAS	TEBAS SUNGAI	616,345,000	-	331,275,000	947,620,000
59	TEBAS	SEMPALAI	616,345,000	-	173,456,000	789,801,000
60	TEBAS	BEKUT	616,345,000	-	115,254,000	731,599,000
61	TEBAS	SEBERKAT	616,345,000	147,071,000	280,428,000	1,043,844,000



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
62	TEBAS	SEJIRAM	616,345,000	147,071,000	180,994,000	944,410,000
63	TEBAS	MAKRAMPAI	616,345,000	-	145,318,000	761,663,000
64	TEBAS	MEKAR SEKUNTUM	616,345,000	147,071,000	211,547,000	974,963,000
65	TEBAS	MENSERE	616,345,000	-	180,045,000	796,390,000
66	TEBAS	PUSAKA	616,345,000	147,071,000	174,992,000	938,408,000
67	TEBAS	SEGEDONG	616,345,000	147,071,000	219,515,000	982,931,000
68	TEBAS	SUNGAI KELAMBU	616,345,000	147,071,000	169,941,000	933,357,000
69	TEBAS	SERUMPUN BULUH	616,345,000	147,071,000	164,072,000	927,488,000
70	TEBAS	PANGKALAN KONGSI	616,345,000	147,071,000	192,658,000	956,074,000
71	TEBAS	DUNGUN PERAPAKAN	616,345,000	-	102,445,000	718,790,000
72	TEBAS	BATU MAKJAGE	616,345,000	147,071,000	267,378,000	1,030,794,000
73	TEBAS	SERINDANG	616,345,000	-	144,808,000	761,153,000
74	TEBAS	BUKIT SIGOLER	616,345,000	294,142,000	210,480,000	1,120,967,000
75	TEBAS	MATANG LABONG	616,345,000	147,071,000	236,415,000	999,831,000
76	TEBAS	MAKTANGGUK	616,345,000	-	141,100,000	757,445,000
77	TEBAS	SEGARAU PARIT	616,345,000	147,071,000	248,396,000	1,011,812,000
78	TEBAS	MARIBAS	616,345,000	294,142,000	193,532,000	1,104,019,000
79	TEBAS	SERET AYON	616,345,000	147,071,000	306,786,000	1,070,202,000
80	PEMANGKAT	PEMANGKAT KOTA	616,345,000	-	530,403,000	1,146,748,000
81	PEMANGKAT	HARAPAN	616,345,000	147,071,000	298,428,000	1,061,844,000
82	PEMANGKAT	PENJAJAP	616,345,000	-	621,002,000	1,237,347,000
83	PEMANGKAT	JELUTUNG	616,345,000	-	404,824,000	1,021,169,000
84	PEMANGKAT	PERAPAKAN	616,345,000	-	264,898,000	881,243,000
85	PEMANGKAT	SEBATUAN	616,345,000	-	84,697,000	701,042,000
86	PEMANGKAT	GUGAH SEJAHTERA	616,345,000	-	104,487,000	720,832,000
87	PEMANGKAT	LONAM	616,345,000	-	91,328,000	707,673,000
88	SEJANGKUNG	SULUNG	616,345,000	-	141,344,000	757,689,000
89	SEJANGKUNG	PENAKALAN	616,345,000	-	127,488,000	743,833,000
90	SEJANGKUNG	SEKUDUK	616,345,000	294,142,000	180,519,000	1,091,006,000
91	SEJANGKUNG	SETALIK	616,345,000	-	139,798,000	756,143,000
92	SEJANGKUNG	PARIT RAJA	616,345,000	-	159,247,000	775,592,000
93	SEJANGKUNG	PIANTUS	616,345,000	147,071,000	209,858,000	973,274,000
94	SEJANGKUNG	PERIGI LANDU	616,345,000	-	175,368,000	791,713,000
95	SEJANGKUNG	SENDOYAN	616,345,000	147,071,000	293,277,000	1,056,693,000
96	SEJANGKUNG	SENUJUH	616,345,000	294,142,000	265,836,000	1,176,323,000
97	SEJANGKUNG	PERIGI LIMUS	616,345,000	147,071,000	159,740,000	923,156,000
98	SEJANGKUNG	SEMANGGA	616,345,000	147,071,000	304,812,000	1,068,228,000
99	SEJANGKUNG	SEPANTAI	616,345,000	147,071,000	194,828,000	958,244,000
100	SELAKAU	SEMELAGI BESAR	616,345,000	147,071,000	286,960,000	1,050,376,000
101	SELAKAU	SUNGAI DAUN	616,345,000	147,071,000	288,014,000	1,051,430,000
102	SELAKAU	SUNGAI RUSA	616,345,000	-	219,626,000	835,971,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
103	SELAKAU	SUNGAI NYIRIH	616,345,000	-	312,719,000	929,064,000
104	SELAKAU	KUALA	616,345,000	-	352,792,000	969,137,000
105	SELAKAU	PARIT BARU	616,345,000	294,142,000	383,692,000	1,294,179,000
106	SELAKAU	TWI MENTIBAR	616,345,000	147,071,000	409,476,000	1,172,892,000
107	SELAKAU	BENTUNAI	616,345,000	147,071,000	560,267,000	1,323,683,000
108	SELAKAU	PANGKALAN BEMBAN	616,345,000	147,071,000	384,571,000	1,147,987,000
109	SELAKAU	PARIT KONGSI	616,345,000	147,071,000	146,021,000	909,437,000
110	SELAKAU	GAYUNG BERSAMBUT	616,345,000	147,071,000	162,202,000	925,618,000
111	PALOH	SEBUBUS	616,345,000	294,142,000	865,606,000	1,776,093,000
112	PALOH	NIBUNG	616,345,000	-	129,994,000	746,339,000
113	PALOH	MALEK	616,345,000	-	140,203,000	756,548,000
114	PALOH	TANAH HITAM	616,345,000	-	127,491,000	743,836,000
115	PALOH	MATANG DANAU	616,345,000	-	170,313,000	786,658,000
116	PALOH	KALIMANTAN	616,345,000	-	216,109,000	832,454,000
117	PALOH	TEMAJUK	616,345,000	-	121,374,000	737,719,000
118	PALOH	MENTIBAR	616,345,000	-	233,218,000	849,563,000
119	SAJINGAN BESAR	KALIAU'	616,345,000	-	163,082,000	779,427,000
120	SAJINGAN BESAR	SEBUNGA	616,345,000	-	170,939,000	787,284,000
121	SAJINGAN BESAR	SANTABAN	616,345,000	-	176,892,000	793,237,000
122	SAJINGAN BESAR	SENATAB	616,345,000	-	239,818,000	856,163,000
123	SAJINGAN BESAR	SUNGAI BENING	616,345,000	294,142,000	312,208,000	1,222,695,000
124	SUBAH	BALAI GEMURUH	616,345,000	-	127,420,000	743,765,000
125	SUBAH	SUNGAI SAPA'	616,345,000	-	87,957,000	704,302,000
126	SUBAH	MADAK	616,345,000	-	147,726,000	764,071,000
127	SUBAH	SABUNG	616,345,000	-	139,725,000	756,070,000
128	SUBAH	TEBUAH ELOK	616,345,000	294,142,000	303,461,000	1,213,948,000
129	SUBAH	SUNGAI DEDEN	616,345,000	-	117,963,000	734,308,000
130	SUBAH	BUKIT MULYA	616,345,000	-	144,600,000	760,945,000
131	SUBAH	MUKTI RAHARJA	616,345,000	-	123,755,000	740,100,000
132	SUBAH	SEMPURNA	616,345,000	-	127,334,000	743,679,000
133	SUBAH	MENSADE	616,345,000	-	172,310,000	788,655,000
134	SUBAH	KARABAN JAYA	616,345,000	147,071,000	189,918,000	953,334,000
135	GALING	SAGU	616,345,000	-	219,123,000	835,468,000
136	GALING	SUNGAI PALAH	616,345,000	-	184,814,000	801,159,000
137	GALING	GALING	616,345,000	-	147,596,000	763,941,000
138	GALING	TEMPAPAN KUALA	616,345,000	-	156,725,000	773,070,000
139	GALING	TEMPAPAN HULU	616,345,000	147,071,000	271,728,000	1,035,144,000
140	GALING	RATU SEPUDAK	616,345,000	-	125,690,000	742,035,000
141	GALING	TRI KEMBANG	616,345,000	-	198,392,000	814,737,000
142	GALING	TRI GADU	616,345,000	-	159,045,000	775,390,000



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
143	GALING	TELUK PANDAN	616,345,000	-	188,441,000	804,786,000
144	GALING	SIJANG	616,345,000	-	200,064,000	816,409,000
145	TEKARANG	TEKARANG	616,345,000	-	156,712,000	773,057,000
146	TEKARANG	MERUBUNG	616,345,000	147,071,000	252,036,000	1,015,452,000
147	TEKARANG	CEPALA	616,345,000	147,071,000	195,301,000	958,717,000
148	TEKARANG	SARI MAKMUR	616,345,000	-	257,602,000	873,947,000
149	TEKARANG	RAMBAYAN	616,345,000	147,071,000	173,993,000	937,409,000
150	TEKARANG	SEMPADIAN	616,345,000	147,071,000	278,630,000	1,042,046,000
151	TEKARANG	MATANG SEGARAU	616,345,000	147,071,000	180,212,000	943,628,000
152	SEMPARUK	SINGA RAYA	616,345,000	-	217,385,000	833,730,000
153	SEMPARUK	SEMPARUK	616,345,000	-	215,562,000	831,907,000
154	SEMPARUK	SEPINGGAN	616,345,000	147,071,000	284,410,000	1,047,826,000
155	SEMPARUK	SEPADU	616,345,000	147,071,000	184,757,000	948,173,000
156	SEMPARUK	SEBURING	616,345,000	147,071,000	278,841,000	1,042,257,000
157	SAJAD	JIRAK	616,345,000	-	255,655,000	872,000,000
158	SAJAD	TENGGULI	616,345,000	-	278,914,000	895,259,000
159	SAJAD	MEKAR JAYA	616,345,000	147,071,000	320,347,000	1,083,763,000
160	SAJAD	BERINGIN	616,345,000	-	262,710,000	879,055,000
161	SEBAWI	RANTAU PANJANG	616,345,000	-	88,872,000	705,217,000
162	SEBAWI	TEBING BATU	616,345,000	147,071,000	182,272,000	945,688,000
163	SEBAWI	SEBAWI	616,345,000	-	206,908,000	823,253,000
164	SEBAWI	SEPUK TANJUNG	616,345,000	-	212,297,000	828,642,000
165	SEBAWI	SEBANGUN	616,345,000	294,142,000	179,378,000	1,089,865,000
166	SEBAWI	SEMPALAI SEBEDANG	616,345,000	-	228,120,000	844,465,000
167	SEBAWI	TEMPATAN	616,345,000	147,071,000	169,190,000	932,606,000
168	JAWAI SELATAN	JAWAI LAUT	616,345,000	147,071,000	212,747,000	976,163,000
169	JAWAI SELATAN	JELU AIR	616,345,000	-	216,228,000	832,573,000
170	JAWAI SELATAN	MATANG TERAP	616,345,000	-	149,303,000	765,648,000
171	JAWAI SELATAN	SUAH API	616,345,000	147,071,000	162,822,000	926,238,000
172	JAWAI SELATAN	SARI LABA A	616,345,000	147,071,000	149,659,000	913,075,000
173	JAWAI SELATAN	SARI LABA B	616,345,000	-	127,134,000	743,479,000
174	JAWAI SELATAN	SEMPERIUK A	616,345,000	147,071,000	153,919,000	917,335,000
175	JAWAI SELATAN	SEMPERIUK B	616,345,000	147,071,000	148,477,000	911,893,000
176	JAWAI SELATAN	SABARAN	616,345,000	147,071,000	342,987,000	1,106,403,000
177	TANGARAN	TANGARAN	616,345,000	-	180,693,000	797,038,000
178	TANGARAN	SIMPANG EMPAT	616,345,000	-	316,410,000	932,755,000
179	TANGARAN	MERABUAN	616,345,000	-	110,944,000	727,289,000
180	TANGARAN	SEMATA	616,345,000	147,071,000	208,817,000	972,233,000
181	TANGARAN	MERPATI	616,345,000	-	168,870,000	785,215,000



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
182	TANGARAN	PANCUR	616,345,000	147,071,000	212,003,000	975,419,000
183	TANGARAN	ARUNG PARAK	616,345,000	147,071,000	204,327,000	967,743,000
184	TANGARAN	ARUNG MEDANG	616,345,000	-	116,717,000	733,062,000
185	SALATIGA	PARIT BARU	616,345,000	294,142,000	311,713,000	1,222,200,000
186	SALATIGA	SUNGAI TOMAN	616,345,000	-	350,044,000	966,389,000
187	SALATIGA	SERUNAI	616,345,000	147,071,000	329,654,000	1,093,070,000
188	SALATIGA	SERUMPUN	616,345,000	147,071,000	200,876,000	964,292,000
189	SALATIGA	SALATIGA	616,345,000	147,071,000	353,795,000	1,117,211,000
190	SELAKAU TIMUR	GELIK	616,345,000	147,071,000	262,445,000	1,025,861,000
191	SELAKAU TIMUR	SERANGGAM	616,345,000	294,142,000	319,046,000	1,229,533,000
192	SELAKAU TIMUR	SELAKAU TUA	616,345,000	147,071,000	449,647,000	1,213,063,000
193	SELAKAU TIMUR	BUDUK SEMPADANG	616,345,000	294,142,000	323,254,000	1,233,741,000

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

MARJUNI, SH  
Pembina Tk. I / (IV/b)  
NIP. 19680612 199710 1 001